

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Kegiatan perekonomian di Sumatera Barat diperankan oleh usaha-usaha mikro dengan pelaku utama para petani, buruh tani, pedagang sarana produksi dan hasil pertanian, pengolah hasil pertanian, dan industri rumah tangga. Permasalahan klasik yang dihadapi oleh para pelaku usaha pada umumnya adalah terbatasnya ketersediaan modal. Sebagai unsur yang sangat penting dalam meningkatkan produksi dan taraf hidup masyarakat pedesaan, keterbatasan modal tentunya dapat membatasi ruang gerak aktivitas masyarakat untuk lebih produktif (Putri, 2013:1).

Menghadapi keterbatasan modal yang dirasakan oleh masyarakat, terutama pengusaha kecil, konsep Lembaga Kredit Mikro (LKM) dapat dihadirkan di tengah masyarakat yang hidup di kawasan pedesaan. Menurut Pusat Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil atau disingkat Pinbuk (2009), LKM merupakan sistem *intermediasi* (penghubung) keuangan pada level mikro baik formal maupun non formal yang didirikan dan dimiliki bersama oleh masyarakat untuk memecahkan masalah atau kendala permodalan dan kebutuhan dana yang dihadapi para anggotanya dalam rangka mengembangkan usaha produktif, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga.

Salah satu jenis LKM yang memadai yang mampu memberikan alternatif pelayanan (produk jasa) simpan – pinjam yang kompatibel dengan kondisi sosial kultural serta ekonomi masyarakat adalah Baitul Mal Wattamwil (BMT). Baitul mal dalam BMT merupakan lembaga keuangan yang berorientasi sosial keagamaan yang usaha utamanya adalah menampung serta menyalurkan harta masyarakat berupa zakat, infaq, shadaqah atau sumber lain yang halal disalurkan kepada mustahik atau untuk dana kebaikan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan sunnah rasul, sedangkan baitul tamwil merupakan lembaga keuangan komersial yang aktivitasnya menghimpun dana yang diperoleh melalui simpanan pihak ketiga dan menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan atau investasi berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan (Ridwan, 2004: 73).

Sejak awal berdirinya, BMT dirancang sebagai lembaga ekonomi. Secara lebih spesifik adalah suatu lembaga ekonomi rakyat, yang secara konsepsi dan secara nyata memang lebih fokus kepada masyarakat bawah yang miskin. Agenda kegiatannya yang utama adalah pengembangan usaha mikro dan usaha kecil, terutama melalui bantuan permodalan. Untuk melancarkan usaha pembiayaan (*financing*) tersebut, maka BMT berupaya menghimpun dana, terutama yang berasal dari masyarakat lokal di sekitarnya. Dengan kata lain, BMT pada prinsipnya berupaya mengorganisasi usaha saling tolong menolong antar warga masyarakat suatu wilayah (komunitas) dalam masalah ekonomi (Awaliil, 2009: 2).

Indonesia merupakan negara agraris, dimana masyarakat menggantungkan perekonomiannya mereka pada sektor pertanian, termasuk Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam yang penduduknya bekerja sebagai petani sebanyak 54% (Lampiran 1). Berada di tengah masyarakat yang didominasi petani, BMT tentunya akan melayani nasabah yang bekerja sebagai petani dan modal yang dipinjamkan akan bermanfaat untuk usahatani. BMT diharapkan mampu berperan terhadap pendapatan dan keuntungan petani dengan pinjaman yang akan menjadi modal bagi petani.

Sebagian besar daerah Kecamatan Banuhampu tanahnya memiliki permukaan yang tidak datar, berbukit, dan landai. Sehingga sangat cocok untuk komoditi pertanian Hortikultura sayuran dan buah. Mayoritas penduduk di Kecamatan Banuhampu adalah petani sayuran dan kondisi ini sangat didukung oleh iklim dengan suhu rata-rata antara 15,3<sup>o</sup> C hingga 24<sup>o</sup> C. (BPS, 2015: 2).

Pembiayaan yang dilakukan BMT untuk petani adalah pembiayaan Mudhorobah yaitu bentuk kerjasama antara pengelola usaha (*Shohibul Mal*) dengan anggotanya yang bertindak sebagai pengelola usaha (*Mudhorib*) yang produktif dan halal. Berikut ketentuan penyaluran dana *Mudhorobah* (Buchori 2012 dalam Putri, 2013: 14) yaitu:

- a. Penyaluran dana *Mudhorobah* adalah penyaluran dana yang disalurkan oleh koperasi syariah kepada anggotanya untuk usaha yang produktif.
- b. Dalam penyaluran dananya Koperasi Syariah bertindak sebagai *Shohibul Mal* mempunyai 100% kebutuhan dana untuk proyek usaha. Anggota sebagai *Mudhorib*/pengelola usaha tersebut.

## B. Rumusan Masalah

Salah satu pemerintah daerah yang menghadirkan LKM di beberapa kecamatan adalah pemerintah Kabupaten Agam. LKM ini adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Agam Madani. KJKS-BMT (Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal wat Tamwil) yaitu sistem intermediasi keuangan di tingkat mikro yang berbadan hukum koperasi yang didalamnya terdapat Baitul Mal dan Baitul Tamwil yang dalam operasionalnya dijalankan dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah (Putri, 2013:3).

KJKS BMT Agam Madani memiliki salah satu kantor di Kecamatan Banuhampu yaitu di Nagari Pakan Sinayan yang merupakan nagari paling luas kedua di kecamatan yaitu 5,21 km<sup>2</sup>, nagari paling luas di kecamatan adalah Nagari Kubang Putihah (Lampiran 2). Nagari Kubang Putihah memiliki lembaga keuangan selain BMT sedangkan Nagari Pakan Sinayan hanya memiliki satu lembaga keuangan yaitu BMT. Kantor cabang BMT Agam Madani di Pakan Sinayan berada di Jorong Surau Baru.

KJKS BMT Agam Madani Pakan Sinayan yang selanjutnya disebut BMT Pakan Sinayan adalah lembaga keuangan yang berada di tengah masyarakat yang didominasi oleh petani gurem (petani berskala kecil yang biasa memiliki lahan kurang dari 0,25 ha). BMT ini termasuk program pemerintah daerah dalam upaya pengentasan kemiskinan berbasis mesjid dibentuk untuk melindungi pengusaha atau pedagang ekonomi lemah dari terdesaknya modal untuk usaha. Penggunaan pinjaman oleh masyarakat menengah ke bawah sering kali bukan hanya ditujukan untuk tujuan produksi, melainkan juga membantu pembiayaan bagi pendidikan anak, konsumtif, ataupun menopang pengeluaran emergensi, seperti kematian, sakit, dan bencana alam lainnya (Ismail, 2014: 7)

BMT Pakan Sinayan merupakan satu-satunya lembaga keuangan di Nagari Pakan Sinayan (Lampiran 3), oleh sebab itu BMT ini menjadi wadah bagi masyarakat sekitar yang mengalami permasalahan keuangan. Lembaga keuangan BMT Pakan Sinayan ini dalam kegiatan operasionalnya menawarkan produk perhimpunan dana dari masyarakat berupa tabungan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat lain dalam bentuk pembiayaan (Annisa, 2012: 3).

Setelah melakukan pra survei lapangan, sebelum adanya lembaga keuangan ini, biasanya selain menggunakan modal sendiri, petani mengandalkan tukang kredit yang meminjamkan uang dengan bunga sekitar 5 sampai 6 persen per bulan, hal ini tentunya akan menurunkan pendapatan dan keuntungan petani jika dibandingkan melakukan pinjaman dengan BMT yang menerapkan sistem syariah. Oleh karena itu dengan adanya BMT di Nagari Pakan Sinayan, diharapkan dapat membantu petani untuk menghadapi kendala tersebut. Jumlah seluruh peminjam di BMT Pakan Sinayan berdasarkan jenis usaha pada tahun 2014 adalah sebanyak 222 orang, usaha yang dijalankan diantaranya petani hortikultura, petani padi, pedagang sayur, pedagang, pedagang warung, konveksi, dan jasa (sopir dan ojek). Dari keseluruhan peminjam didominasi oleh petani hortikultura, yaitu sebanyak 82 orang (Lampiran 4).

Petani yang melakukan pinjaman di BMT Agam Madani Pakan Sinayan didominasi oleh petani hortikultura dengan komoditi yang bermacam – macam. Komoditi yang paling banyak diusahakan oleh petani adalah komoditi cabai dan lobak dengan jumlah peminjam sebanyak 15 orang. Dibandingkan dengan usahatani lobak usahatani cabai lebih banyak membutuhkan modal, hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya modal yang dipinjam oleh petani cabai pada tahun 2014 totalnya yaitu Rp 54.500.000 dari pada pinjaman oleh petani lobak totalnya adalah Rp 32.000.000 (Lampiran 5).

Menurut salah satu petani, menanam cabai lebih banyak resiko dibandingkan dengan menanam sayuran lainnya, karena modal yang lebih banyak dan harga yang berfluktuasi. Pengolahan lahan yang baik, pemupukan dasar, pemupukan ulang, penyiangan, penyemprotan dan intensitas panen yang berulang-ulang membuat modal yang harus disiapkan oleh petani tidak sedikit, modal tersebut disiapkan untuk membeli pupuk, pestisida, upah tenaga kerja dan pembelian sarana produksi lainnya. Apabila mengandalkan modal sendiri tidak mencukupi, oleh sebab itu petani membutuhkan tambahan modal untuk berusahatani cabai.

Tanaman cabai yang ditangani oleh petani Indonesia rata-rata hasilnya adalah 15 – 30 kuintal/ha dan setinggi – tingginya 60 kuintal/ha (Setiadi, 2011: 29). Menurut petani sekitar daerah penelitian yang peneliti temui, rata – rata hasil



panen per hektar sekitar 10 sampai 20 kuintal. Tentu saja hasil panen ini masih bisa ditingkatkan jika diukur rata – rata hasil panen maksimal yang dapat diperoleh petani Indonesia. Penyebab kurang maksimalnya hasil panen ini diantaranya serangan jamur saat musim penghujan. Menurut Setiadi curah hujan yang sesuai untuk cabai adalah 600 – 1.250 mm per tahun, sedangkan di Kecamatan Banuhampu, curah hujan dapat mencapai 2.000 mm per tahun. Pengendalian serangan jamur biasanya dengan fungisida antracol, menurut petani pestida cukup mahal. Untuk pupuk umumnya petani memberikan dosis pupuk ZA untuk tanaman cabai 200 kg/Ha/Musim tanam, seharusnya dosis pupuk ZA sesuai anjuran adalah 500-600 kg/Ha/Musim tanam. Hal ini dikarenakan kurangnya modal petani untuk membeli kebutuhan usahatani. Sehingga petani membutuhkan tambahan modal untuk membelinya. Maka dibutuhkan lembaga yang dapat membantu menangani permasalahan ini.

Pada lima tahun terakhir produksi tanaman cabai di kecamatan Banuhampu mengalami peningkatan sebesar 5,74% (Lampiran 6), dari tahun ke tahun produksi tanaman cabai menunjukkan perkembangan yang baik, hal ini menandakan banyaknya petani yang mengusahakan tanaman cabai atau produksi petani per orang yang mengalami peningkatan. Sebagai lembaga yang bertujuan untuk mengembangkan usaha mikro dan merupakan satu-satunya lembaga keuangan di Nagari Pakan Sinayan, BMT diharapkan mempunyai peran dalam menyokong kegiatan produktif, dimana salah satunya adalah usahatani cabai, dengan pertimbangan petani cabai merupakan petani yang dominan menggunakan dana pinjaman BMT (Lampiran 5), sehingga petani penerima pinjaman mendapatkan pendapatan dan keuntungan lebih baik daripada petani non penerima pinjaman. Dari uraian diatas, maka pertanyaan penelitian yang timbul adalah:

1. Bagaimana aktivitas BMT Pakan Sinayan dalam kegiatan pertanian?
2. Bagaimana pendapatan dan keuntungan petani cabai penerima pinjaman dibandingkan dengan non penerima pinjaman BMT Pakan Sinayan?

Berdasarkan hal diatas penulis ingin melihat peranan pinjaman BMT terhadap pendapatan dan keuntungan petani cabai dengan membandingkan pendapatan dan keuntungan petani cabai penerima dan non penerima pinjaman BMT di Nagari Pakan Sinayan. Oleh karena itu penelitian diberi judul **“Peranan**

**Pinjaman Baitul Mal wat Tamwil (BMT) terhadap Pendapatan dan Keuntungan Petani Cabai di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam”.**

**C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan aktivitas BMT Pakan Sinayan dalam kegiatan pertanian.
2. Menganalisa perbandingan pendapatan dan keuntungan usahatani cabai petani penerima dan non penerima pinjaman BMT di Nagari Pakan Sinayan.

**D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian diatas maka manfaat yang diharapkan penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagi BMT, sebagai bahan referensi dan masukan bagi BMT Pakan sinayan dan instansi terkait lainnya dalam memberikan pinjaman terhadap nasabah petani.
2. Bagi Pembaca, sebagai bahan informasi dan masukan bagi penelitian selanjutnya terutama yang sesuai dengan penelitian.

